**ARAHAN ZONASI PENATAAN RUANG DAN AKTIVITAS PKL DI RUANG TERBUKA PUBLIK KAWASAN PUSAT PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG**

**Nika Audina**1, **Muhammad Irfan Affandi**2, **Fran Sinatra3**

2 Institut Teknologi Sumatera, Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan

1 Email : [nika.22116030@student.itera.ac.id](mailto:nika.22116030@student.itera.ac.id)

*Sengaja dikosongkan*

***ABSTRAK***

*PKL yang menempati ruang terbuka publik di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung belum memiliki ruang khusus yang diperuntukkan untuk PKL (lokasi binaan) sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik penggunaan ruang. Diperlukan alternatif penyelesaian masalah keberadaan PKL di ruang terbuka publik tersebut melalui arahan zonasi penataan ruang dan aktivitas yang akan mencakup arahan kebijakan, penyediaan ruang dan waktu operasional PKL. Penelitian ini merupakan penelitian deduktif dengan metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan spasial. Dari hasil analisis yang dilakukan kemudian didapatkan hasil bahwa dalam arahan penataan ruang diperlukan adanya arahan perizinan melalui TDU (Tanda Daftar Usaha), arahan penggunaan sarana berdagang yang efisien, arahan penyediaan lahan parkir dan arahan untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah sampah secara mandiri dan pengaturan aktivitas melalui arahan waktu operasional. Dari arahan penataan ruang dan aktivitas kemudian dibentuk zonasi kegiatan PKL yang terdiri dari zona hijau yang artinya boleh ada kegiatan berdagang, zona kuning yang berarti boleh ada kegiatan berdagang dengan syarat tertentu dan zona merah dilarang ada kegiatan berdagang. Zonasi tersebut ditentukan berdasarkan hasil analisis karakteristik fisik dan aktivitas PKL, arahan penataan ruang, dan arahan waktu operasional. Adanya zonasi ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan ruang terbuka publik yang tersedia untuk kegiatan PKL.*

***Kata Kunci*** : *ruang terbuka publik, penataan PKL, zonasi.*

***ABSTRACT***

*Street vendors who occupy public open spaces in Bandar Lampung urban centers do not yet have a designated space for street vendors (fostered locations), which can lead to conflicts over the use of space. An alternative is needed to solve the problem of the existence of street vendors in public open spaces through zoning directives for spatial planning and activities that will include policy directions, provision of space and time for street vendors to operate. This research is a deductive research with data collection methods through observation and interviews and then analyzed using descriptive and spatial analysis. From the results of the analysis carried out, it was found that in the spatial planning directive, a permit / legality direction through a TDU (Business Registration Certificate) was required, directions for the use of efficient trading facilities, directions for providing parking space and directions for carrying out waste management activities independently. Activity settings are set through operational time directives. From the spatial planning directives and activities, a street vendor activity zoning was formed which consisted of a green zone, which means trading activities were allowed, a yellow zone which means trading activities were allowed with certain conditions and the red zone was prohibited from trading activities. The zoning is determined based on the analysis of the physical characteristics and activities of street vendors, spatial planning directions, and operational time directions. This zoning is carried out to maximize the use of public open space available for street vendors activities.*

***Keywords:*** *public open space, arrangement of street vendors, zoning.*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Fenomena keberadaan PKL terutama di kota besar bukan merupakan hal baru. Menurut Widjajanti (2015) kawasan perkotaan memiliki kondisi dualistik. Sujarto (1981) dalam Widjajanti (2015) menyatakan istilah dualistik memiliki konotasi pada terjadinya pertemuan dua kondisi atau sifat yang berbeda. Kondisi tersebut pada kawasan perkotaan kemudian ditunjukkann oleh berbagai hal salah satunya terlihat dari adanya sektor formal dan informal. Keberadaannya yang belum diatur menyebabkan belum tertatanya keberadaan PKL dalam ruang kota. PKL sering kali ditemukan pada ruang-ruang terbuka publik di kawasan perkotaan. PKL dan ruang terbuka publik merupakan elemen yang sulit dipisahkan, Puspitasari (2009) dalam paper yang ditulis oleh Eko Handoyo untuk Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank berjudul Makna Ruang Publik Bagi Pedagang Kaki Lima, Studi tentang Resistensi terhadap Penggusuran Tahun 2015 mengatakan bahwa PKL tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di ruang publik, terutama di kawasan perdagangan. PKL cenderung melakukan kegiatan berdagang di ruang terbuka publik dengan alasan dekat dengan keramaian dan menambah pendapatan/ keuntungan. Bandar Lampung sebagai wilayah perkotaan sekaligus ibu kota Provinsi Lampung tidak terlepas dari masalah terkait dualistik perkotaan yaitu keberadaan sektor informal, salah satunya adalah sektor informal PKL. Keberadaannya juga belum ditata dan mengganggu manfaat ruang lain seperti badan jalan dan jalur pedestrian. Salah satunya di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung, disekitar RTH Taman Gajah dan sarana olahraga Lapangan Saburai, koridor Jalan Ahmad Yani – Jalan R. A Kartini dan koridor Jalan Raden Intan. PKL di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung belum memiliki penataan ruang dan pengaturan aktivitas khusus sehingga masih menempati ruang-ruang publik yang tidak diperuntukkan untuk PKL. Rencana penataan ruang dalam RTRW serta program penataan PKL di RPJMD Kota Bandar Lampung belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga sampai saat ini, Bandar Lampung belum mempunyai arahan zonasi khusus terkait penataan ruang dan aktivitas PKL terutama di kawasan ruang terbuka publik di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut dalam penyusunan arahan penataan ruang dan zonasi aktivitas PKL di ruang terbuka publik di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung.

1. **Rumusan Masalah**

Bagaimana arahan zonasi penataan lokasi/ ruang serta pengaturan aktivitas PKL di ruang terbuka publik kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung?

1. **Tujuan**

Menemukan alternatif penyelesaian permasalahan ruang dan aktivitas PKL melalui arahan zonasi penataan ruang dan pengaturan aktivitas PKL di ruang terbuka publik pada kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung. Tujuan ini kemudian dicapai melalui 4 sasaran yaitu:

1. Mengidentifikasi kebijakan dan peraturan penataan PKL.
2. Mengidentifikasi karakteristik fisik dan aktivitas PKL di ruang terbuka publik kawasan perkotaan Kota Bandar Lampung.
3. Mengidentifikasi preferensi stakeholder penataan PKL di ruang terbuka publik Kota Bandar Lampung.
4. Menyusun arahan zonasi penataan ruang dan pengaturan aktivitas PKL di ruang terbuka publik secara terpadu dan terintegrasi.
5. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Muslimin (2016) dalam Moleong (2004), pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeksripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif karena penelitian ini berangkat dari berbagai teori yang didapatkan dan dibandingkan dengan keadaan fakta/ kondisi eksisting. Untuk mendapatkan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk nantinya akan diuji ke lapangan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan maka pengumpulan data penelitian ini terbagi dalam dua kelompok besar yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan langsug terjun ke lapangan. Data primer yang digunakan merupakan data karakteristik fisik dan aktivitas PKL yang didapatkan melalui obervasi dan wawancara. Menurut Hasanah (2017), observasi dalam implementasinya tidak hanya berperan sebagai teknik paling awal dan mendasar dalam penelitian, tetapi juga teknik paling sering dipakai, seperti observasi partisipan, rancangan penelitian eksperimental, dan wawancara. Menurut (Santana, 2007) dalam Hasanah (2017) metode observasi yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian bervariasi tergantung pada setting, kebutuhan dan tujuan penelitian. Wawancara kemudian dilakukan kepada PKL dan konsumen PKL. Wawancara menurut Moleong (2004) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara terstruktur.

1. **Metode Pemilihan Sampel**

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan *non probability sampling* karena populasi PKL yang tidak diketahui. Metode yang digunakan yaitu *purposive sampling. Purposive sampling* menurut Bernard (2002) dalam Etikan et.al (2016) disebut juga judgement sampling. Purposive sampling dalam sederhananya merupakan metode dimana peneliti memutuskan apa yang perlu diketahui dan ditetapkan untuk menemukan narasumber/ responden yang dapat dan bersedia memberikan informasi berdasarkan pengetahuan/ pengalaman. Sedangkan kriteria responden yaitu: PKL yang melakukan kegiatan berdagang di ruang terbuka publik di wilayah penelitian baik segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Untuk konsumen, data diambil secara online menggunakan google formulir, dengan kriteria yaitu responden merupakan konsumen/pembeli dari PKL yang berada di lokasi penelitian selama kurun waktu ±6 bulan terakhir. Lokasi penelitian yaitu Kawasan sekitar Lapangan Saburai dan Taman Gajah hingga Koridor Jalan Ahmad Yani - Jalan R.A Kartini (depan Mall Kartini, Central Plaza hingga Wisma Gatam) - Jalan Raden Intan (Stasiun Tanjung Karang hingga Gramedia)

1. **Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deksriptif. Menurut Bodgan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2004) menyatakan bahawa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati. Analisis spasial juga digunakan dalam penelitian ini untuk menentuka ruang kegiatan PKL. Proses Analisa Spasial meliputi kegiatan membuat buffer disekitar titik *(point)*, garis *(line)* dan area *(polygon)*, menganalisis peta dengan titik, garis dan area dengan proses *overlay* mengunakan metode intersection, union, identitas, hapus, dan klip.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Kebijakan dan Peraturan Penataan PKL**

Keberadaan sektor informal yang besar di Indonesia membuat penataan sektor informal memiliki urgensi untuk dilakukan mengingat sebagian besar masyarakat bergantung kepada sektor tersebut. Pedoman penataan PKL kemudian dibentuk melalui Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL. Pedoman tersebut berisi kondisi ideal penataan PKL disetiap jenjang/ skala wilayah di Indonesia. Pedoman tersebut kemudian menjadi dasar dan pedoman dalam penataan ruang kegiatan PKL di Indonesia. Berdasarkan Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan juga bahwa Gubernur dan Walikota wajib melakukan penataan PKL dimana penataan tersebut dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL di kawasan perkotaan. Dalam penataan PKL kemudian selanjutnya diatur dalam Perda/ Perwali dari setiap kawasan perkotaan.

Kota Bandar Lampung memiliki Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki lima. Dalam peraturan tersebut telah dimuat ketentuan lokasi kegiatan PKL yang ditetapkan oleh walikota meliputi:

1. Kawasan yang disediakan khusus oleh Pemerintah Daerah dengan pedoman pada Rencana Tata ruang Wilayah;
2. Kawasan pasar modern;
3. Kawasan pasar tradisional;
4. Lokasi yang ditentukan atau diijinkan Pemerintah Daerah pada jam-jam tertentu;
5. Kawasan pada event atau kegiatan keramaian yang sifatnya insidental.

Pada peraturan daerah mengenai pengelolaan PKL tersebut memang telah ditetapkan lokasi yang dapat mengakomodasi kegiatan PKL dengan ketentuan lanjutan. Ketentuan lanjutan mengenai lokasi penataan PKL akan dimuat dalam Peraturan Walikota tentang penataan PKL yang Kota Bandar Lampung sendiri belum memiliki kebijakan dan peraturan khusus terkait penetapan ruang untuk kegiatan penataan PKL. Pembahasan lokasi penataan PKL pada Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan PKL sebatas kepada lokasi yang sesuai rencana dan mengakomodasi kegiatan PKL. Bandar Lampung belum memiliki peraturan yang mengatur secara khusus ruang dan aktivitas untuk PKL terutama di ruang terbuka publik.

1. **Karakterstik fisik dan aktivitas PKL.**

Karakteristik fisik dan aktivitas PKL pada penelitian ini diamati melalui observasi serta wawancara dengan PKL dan konsumen PKL. Variabel yang diamati untuk mengetahui karakteristik fisik dan aktivitas PKL terdiri dari variabel karakteristik lokasi persebaran dan aktivitas PKL meliputi lokasi, jenis dagangan, sarana berdagang, waktu berdagang, luas lapak dan pola pelayanan. Variabel kedua yaitu pola penyebaran PKL/ *streer vendor concentration* meliputi market focus aglomeration (mengelompok) dan street concentration (linier mengikuti jalan). Variabel ketiga yaitu sifat pelayanan PKL berupa sifat pelayanan menetap, semi menetap dan tidak menetap. Dan variabel terakhir preferensi masyarakat yang terdiri dari alasan berbelanja, manfaat PKL, gangguan yang ada, pengelompokkan PKL, pengaturan PKL, hal yang perlu diatur, fasilitas umum yang perlu ditambah dan kesesuaian lokasi PKL. Observasi dilakukan berdasarkan lokasi persebaran PKL/ segmen.

1. **Karakteristik lokasi persebaran PKL.**

* Segmen 1 (RTH Taman Gajah dan Lapangan Saburai): Kawasan RTH dan sarana olahraga yaitu RTH Taman Gajah dan Lapangan Saburai. Didominasi oleh PKL makanan dan minuman dan menempati trotoar disekitar RTH dan lapangan saburai, serta lahan parkir pertokoan yang sudah tidak beroperasi jika malam hari.
* Segmen 2 (Koridor Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan R.A Kartini): segmen ini merupakan jalan utama (jalan arteri sekunder). Adanya kegiatan PKL koridor jalan arteri sekunder pada segmen 2 dapat menimbulkan gangguan dan hambatan lalu lintas. Segmen 2 berada pada kawasan perdagangan dan jasa menimbulkan adanya kegiatan sektor informal PKL. PKL menempati ruang terbuka publik berupa trotoar sepanjang koridor jalan dan lahan parkir pertokoan hingga badan jalan.
* Segmen 3 (Koridor Jalan Raden Intan): segmen 3 memiliki fungsi kawasan sebagai kawasan CBD, serta pusat perdagangan dan jasa. Jalan Raden Intan juga merupakan jalan arteri sekunder. PKL yang ada pada lokasi ini menempati limpasan toko, trotoar serta lahan parkir pertokoan.

1. **Karakteristik pola persebaran PKL**

Dari hasil observasi, PKL pada segmen 1 memiliki pola persebaran *focus market aglomeration* sedangkan untuk pola persebaran segmen 2&3 yaitu *street concentration/* linier mengikuti jalan.



*Gambar 1. Pola Persebaran PKL*

1. **Karakteristik Jenis Dagangan**

Pada segmen 1 jenis dagangan di dominasi oleh pedaganga jenis makanan dan minuman. Untuk segmen 2 didominasi oleh pedagang jenis barang dagangan berupa makanan dan minuman serta beberapa PKL dengan jenis dagangan barang dan buah-buahan. Untuk segmen 3 PKL didominasi oleh pedagang kelonton serta makanan dan minuman pada sore hingga malam hari. Jenis dagangan akan dipengaruhi pula oleh kegiatan yang ada di lokasi persebaran.

1. **Karakteristik Sarana dan Luas Lapak Berdagang**

Pada segmen 1 luas lapak yang digunakan PKL di kawasan ini terbagi menjadi dua macam, pedagang dengan perlengkapan konsumen seperti kursi dan meja makan, dan pedagang yang hanya menggunakan gerobak/ meja. Sehingga luas lapak yang dibutuhkan untuk PKL dengan sarana berdagang lengkap kurang lebih 9 x 3 meter dan PKL yang hanya menggunakan gerobak/ meja yaitu kurang lebih 2 x 1 meter. Luas lapak yang digunakan yaitu untuk PKL di lokasi ini terbagi sesuai dengan sarana yang digunakan para PKL. PKL yang menggunakan tenda, serta PKL yang menjual beberapa barang memiliki luas lapak minimal 6 x 3 meter. Untuk PKL yang tidak menggunakan tenda memiliki luas lapak kurang lebih 2x1 meter s.d 3x1 meter. Untuk segmen 3 dengan dominas PKL jasa, luas lapak yang digunakan yaitu rata-rata seluas 3 x 1 meter karena sarana yang digunakan berupa gerobak dan gelaran.

1. **Karakteristik Waktu Berdagang**

Dari hasil observasi, didapatkan karakteristik berdagang PKL di wilayah penelitian terbagi menjadi dua waktu operasional. Ada PKL yang memulai dari pagi hari dan PKL yang memulai pada sore hari. Untuk segmen 1 Waktu berdagang PKL terbagi menjadi 2 yaitu PKL yang beroperasi dari pagi hari pukul 07.00 s.d. 17.00 dan PKL yang mulai beroperasi sore hari pada pukul 17.00 s.d. dini hari. Untuk segmen 2 Waktu berdagang PKL terbagi menjadi dua yaitu PKL yang beroperasi dari pagi hari pukul 08.00 s.d. 16.00 dan PKL yang mulai beroperasi pada pukul 17.30 s.d. pukul 23.00 dan sebagian sampai dini hari. Dan untuk segmen 3 Waktu berdagang terbagi menjadi dua yaitu pada pukul 07.30 s.d. 16.30 serta pada pukul 17.30 s.d. 22.00, beberapa PKL kelontong di lokasi ini juga membuka lapaknya sejak pagi hari hingga malam hari.

1. **Karakteristik sifat pelayanan PKL.**

Segmen 1 yang berada di RTH dan lapangan saburai dengan dominasi PKL makanan dan minuman memiliki PKL dengan sifat menetap dan semi menetap. Untuk segmen 2 dengan jenis PKL yang lebih beragam memiliki sifat pelayanan PKL menetap dan semi menetap serta beberapa pedagang mobile (berpindah-pindah tempat). Dan untuk segmen 3 PKL bersifat menetap dan semi menetap.

1. **Preferensi Stakeholder dalam Penataan PKL (PKL dan Konsumen PKL)**

Wawancara dilakukan dengan total jumlah responden 16 PKL meliputi 5 PKL makanan dan minuman, 2 PKL Kelontong, 3 PKL Barang, 4 PKL Jasa, dan 2 PKL Buah-buahan yang tersebar di wilayah penelitan. Didapatkan informasi terkait karakteristik fisik PKL berupa alasan pemilihan lokasi, sarana berdagang yang digunakan serta luas lapak yang dibutuhkan untuk berdagang.

**Tabel 1. Hasil Wawancara PKL (Karakter Fisik PKL)**

| **No.** | **Karakteristik Fisik PKL** | **Hasil Wawancara** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pemilihan Lokasi | Terkait alasan pemilihan lokasi, PKL dengan jenis dagangan baik makanan dan minuman, buah-buahan, barang, jasa dan kelontong di masing-masing lokasi penelitian mengatakan bahwa alasan mereka menempati lokasi tersebut untuk berdagang yaitu:  - lokasi yang ramai (dekat dengan pusat keramaian)  - lokasi dianggap strategis  - lokasi merupakan jalan utama sehingga selalu ramai  - lokasi dekat dari tempat tinggal PKL |
| 2 | Sarana Berdagang | Sarana berdagang yang digunakan oleh PKL di lokasi penelitian yaitu antara lain:  - tenda, meja, kursi  - gerobak  - etalase  - gelaran |
| 3 | Luas Lapak | Luas lapak PKL di lokasi penelitian terbagi menjadi beberapa ukuran yaitu:  - 1m2 - 5m2  - 2m2 - 12m2  - 6m2 - 36m2 |

*Sumber: Hasil analisis, 2020.*

**Tabel 2. Hasil Wawancara PKL (Aktivitas PKL)**

| **No** | **Karakteristik Aktivitas PKL** | **Hasil Wawancara** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lama berdagang | Lama waktu berdagang PKL yang ada di lokasi beragam mulai dari 1-5 tahun 5-10 tahun dan hampir 30 tahun menjadi PKL di lokasi tersebut. |
| 2 | Waktu berdagang | Waktu berdagang PKL terbagi menjadi empat bagian secara garis besar yaitu:   * PKL pagi - sore hari, rata-rata PKL mulai berdagang pukul 08.00 s.d. 09.00 dan selesai pada sore hari yaitu sekitar pukul 17.00 s.d. 18.00. * PKL pagi - malam hari, rata-rata PKL mulai berdagang pukul 08.00 s.d. 09.00 dan selesai pada malam hari yaitu sekitar pukul 21.00 s.d. pukul 00.00. * PKL sore - malam hari, rata-rata PKL mulai berdagang pukul 16.00 s.d. 17.00 dan selesai pada malam hingga dini hari yaitu sekitar pukul 2300 s.d. 02.00. * PKL 24 jam (dari hasil wawancara merupakan PKL Kelontong). |

*Sumber: Hasil analisis, 2020.*

**Tabel 3. Unit informasi tambahan.**

| **No** | **Unit Informasi Tambahan** | **Wawancara** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Upaya pemerintah | * PKL menyebutkan bahwa belum ada upaya dari pemerintah melakukan penataan PKL seperti sosialisasi kepada PKL untuk menjelaskan hak dan kewajiban PKL serta pelatihan juga belum ada dari pemerintah. * Pemerintah melalui DLH mengadakan retribusi sebesar dua ribu rupiah sebagai retribusi kebersihan PKL di lokasi penelitian. |
| 2 | Penertiban | Penertiban pernah dilakukan beberapa kali dalam setahun dan penertiban dilakukan oleh Satpol PP dengan alasan penertiban:   * Menggangu pengguna jalan karena sarana berdagang menggunakan badan jalan. * Tidak menyisakan ruang untuk pejalan kaki di trotoar. * Ada kegiatan khusus disekitar lokasi penelitian yang mengharuskan penertiban PKL agar lokasi terlihat lebih rapih |
| 3 | Kebutuhan selama berdagang | Dalam wawancara PKL juga menyebutkan beberapa kebutuhan berdagang dan bagaimana mendapatkannya, diantaranya adalah:   * Air bersih: bekerja sama dengan gedung/ tempat usaha yang ada di dekat lokasi berdagang. * Listrik diusahakan sendiri oleh PKL * Sampah yang dihasilkan dibuang ke tempat pembuangan sampah terdekat. |

*Sumber: Hasil analisis, 2020.*

Pada bagian ini akan dibahas tentang preferensi masyarakat dalam penataan ruang serta aktivitas PKL di lokasi penelitian. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini yaitu konsumen dari PKL yang berada di lokasi penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria responden yaitu masyarakat yang pernah berbelanja/ menjadi konsumen dari PKL di lokasi penelitian pada 6 bulan terakhir. Pengumpulan data dilakukan secara online menggunakan google formulir yang kemudian disebarkan masyarakat yang pernah menjadi konsumen PKL di wilayah penelitian.

**Tabel 4. Hasil wawancara konsumen PKL.**

| **No.** | **Pertanyaan** | **Hasil Reduksi Wawancara** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mengapa memilih berbelanja di PKL? (sebutkan alasan berbelanja atau menjadi konsumen PKL) | * lebih mudah dalam hal akses * lebih murah/ harga terjangkau * mudah ditemui * lebih menarik dan bervariasi |
| 2. | Apakah adanya PKL di lokasi ini sering kali menganggu ketertiban dan menimbulkan permasalahan? (jelaskan gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh adanya PKL) | * tidak adanya lahan parkir menyebabkan ada parkir liar * menimbulkan kecamatan * mengganggu keindahan kota * mengganggu estetika dan kerapihan kota * kebersihan yang kurang dijaga (sampah) * terganggunya pejalan kaki |
| 3. | Apakah ada kerugian yang diakibatkan dari adanya PKL yang berdagang di lokasi ini? (jelaskan secara singkat jawaban anda) | * tidak ada kerugian yang ditimbulkan * pengurangan lebar jalan karena digunakan berdagang * mengganggu ketertiban dan kerapihan kawasan * permasalahan karena sampah yang tidak diatur dengan baik |
| 4. | Apa manfaat yang dirasakan dari adanya PKL di lokasi ini? | * menjadi daya tarik kawasan pusat perkotaan (menarik pengunjung) * lebih menghidupkan kawasan * lebih efektif dalam mencari barang dan kebutuhan sehari-hari |
| 5. | Apakah ada saran terkait lokasi serta aktivitas berdagang PKL di lokasi ini? (misal saran terkait dimana seharusnya PKL berada, serta fasilitas apa yang seharusnya ada di lokasi berdagang PKL) | * penyediaan ruang khusus untuk PKL agar tidak mengganggu aktivitas/ kegiatan lain disekitarnya * penyediaan area parkir dalam ruang kegiatan PKL * adanya fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung penataan |

*Sumber: Hasil analisis, 2020.*

1. **Arahan zonasi penataan ruang dan aktivitas PKL.**

Dari hasil analisis yang dilakukan maka zonasi penataan ruang dan aktivitas PKL dibagi menjadi dua aspek yaitu penataan ruang dan pengaturan aktivitas. Penataan ruang terdiri dari aspek kebijakan dan penyediaan ruang. untuk aspek pengaturan aktivitas akan terdiri dari waktu operasional. Keduanya kemudian akan membentuk zonasi penataan ruang untuk PKL di ruang terbuka publik kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung.

1. Arahan penataan ruang terdiri dari:

* Arahan untuk menerbitkan pemberian izin di lokasi penelitian (mencakup ketiga segmen) untuk melakukan kegiatan berdagang melalui TDU/ lisensi PKL.
* Arahan penggunaan sarana berdagang yang mudah dipindah dan dibongkar pasang sehingga lebih efisien untuk digunakan.
* Arahan penyediaan lahan parkir pada setiap segmen di lokasi penelitian.
* Arahan untuk melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari berdagang secara mandiri serta PKL wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan terkait kewajiban menjaga kebersihan lokasi berdagang.

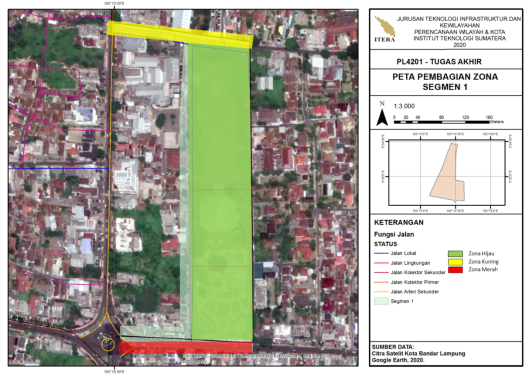
1. Arahan pengaturan waktu operasional PKL.

**Tabel 5. Waktu operasional PKL.**

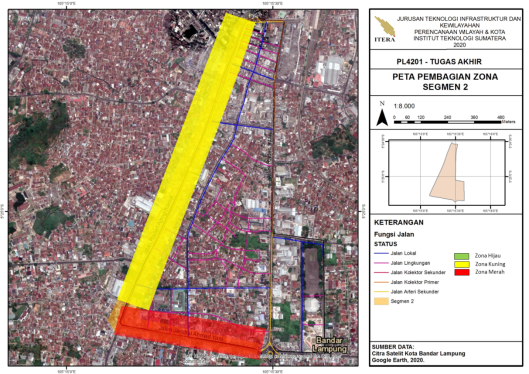
| **No.** | **Segmen PKL** | **Waktu Operasional** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Segmen 1 (Kawasan Lapangan Saburai dan RTH Taman Gajah) | Dua arahan waktu operasional yaitu pada PKL yang ada yaitu pagi hari pukul **07.00 s.d. 17.00 dan sore hari pada pukul 17.00 s.d. dini hari.** |
| 2 | Segmen 2 (Jalan Ahmad Yani - Jalan R. A Kartini) | Waktu operasional yang diperbolehkan adanya aktivitas PKL disesuaikan dengan karakteristik yang ada yaitu terbagi menjadi dua waktu operasional **pagi hari pukul 08.00 s.d. 16.00 dan sore hari dimulai pukul 17.00 s.d. dini hari.** |
| 3 | Segmen 3 (Jalan Raden Intan) | Waktu operasional dibagi menjadi dua, **pagi hari pukul 08.00 hingga pukul 17.00 dengan ketentuan PKL yang diperbolehkan yaitu PKL jasa, dan PKL kelontong. PKL selain PKL jasa dan PKL barang diperbolehkan berdagang pada waktu operasional sore hingga malam hari yaitu pada pukul 17.00 s.d. 22.00.** |

*Sumber: Hasil analisis, 2020.*

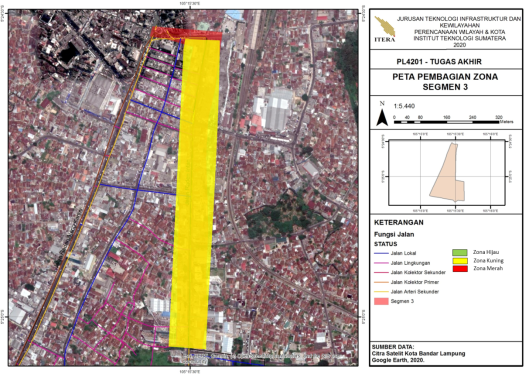
Selanjutnya penataan PKL akan dilakukan dengan penentuan zonasi penataan ruang dan aktivitas yang dibentuk berdasarkan pertimbangan hasil analisis karakteristik fisik dan aktivitas PKL yang ada serta preferensi konsumen dan PKL, juga pedoman yang telah ada dalam penataan PKL. Berikut peta hasil zonasi penataan ruang dan aktivitas PKL. Zona yang terbentuk yaitu zona hijau berarti diperbolehkan berdagang, zona kuning diperbolehkan berdagang dengan syarat dan zona merah tidak diperbolehkan berdagang. Hal tersebut diatur sesuai dengan waktu operasional dan ketentuan karakteristik fisik PKL berupa sarana berdagang dan luas lapak.



**Gambar 2. Zonasi Penataan Ruang dan Aktivitas PKL segmen 1.**

****

**Gambar 3. Zonasi Penataan Ruang dan Aktivitas PKL Segmen 2.**

****

**Gambar 4. Zonasi Penataan Ruang dan Aktivitas PKL Segmen 3.**

1. **KESIMPULAN**

Penataan dan penyediaan ruang khusus untuk PKL dilakukan agar dapat menyelesaikan permasalahan keberadaan PKL dalam penggunaan ruang terbuka publik sebagai lokasi berdagang. Pengaturan waktu operasional PKL kemudian juga dilakukan untuk melengkapi penataan ruang PKL. Penataan ruang dan waktu operasional dilakukan agar ruang yang tersedia dapat dimaksimalkan penggunaannya. Ruang terbuka publik yang ada dapat digunakan untuk lebih dari satu kegiatan dengan memperhatikan waktu operasional kegiatan dalam ruang tersebut. Sehingga arahan zonasi yang ada diarahkan kepada penataan ruang dan pengaturan aktivitas melalui penentuan waktu operasional.

Penataan ruang dan aktivitas PKL ini kemudian dapat menyelesaikan permasalahan keberadaan PKL di ruang terbuka publik kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung sebesar 70% yang dilakukan melalui arahan penataan ruang berupa arahan perizinan/ legalitas kegiatan berdagang PKL di lokasi yang telah ditetapkan, arahan penggunaan sarana berdagang yang mudah dipindah dan dibongkar pasang agar lebih efsien, arahan penyediaan lahan parkir, dan arahan untuk melakukan pengelolaan limbah sampah secara mandiri dan menjaga kebersihan lokasi berdagang serta pengaturan waktu operasional yang berlaku di wilayah penelitian. Arahan zonasi penataan ruang dan aktivitas PKL belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan keberadaan PKL di ruang terbuka publik karena ruang lingkup penataan yang belum menyeluruh (hanya PKL semi menetap dan menetap) dan belum termasuk ke dalam PKL musiman. Selain itu penataan ruang PKL dalam lingkup ruang terbuka publik berupa trotoar belum bisa maksimal karena trotoar yang ada belum memenuhi standar/ ketentuan luas trotoar untuk jalan utama (jalan arteri sekunder) dan RTH sehingga penyedian ruang usaha untuk PKL di trotoar belum dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai standar.

**DAFTAR PUSTAKA**

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5*(1), 1-4.

Handoyo, E. (2015). Makna Ruang Publik Bagi Pedaang Kaki Lima: Studi tentang Resistensi terhadap Penggusuran. *Seminar Nasional Multi Displin Ilmu & Call For Papers Unisbank*, (hal. 1-12). Semarang.

Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum, 8*(1), 21-46.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Bandar Lampung. 2016.

*Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Bandar Lampung. 2011.

Widjajanti, R. (2015). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pecinan, Semarang. *RUANG, 1*(2), 61-70.

Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset .